

**Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Dalam
Perspektif Masyarakat Lintau
(1958-1961)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata I (S1)
Pada Program Studi Pendidikan Sejarah*



Oleh:

DANI RHAMADAN

97141/2009

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA (PRRI) DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT LINTAU

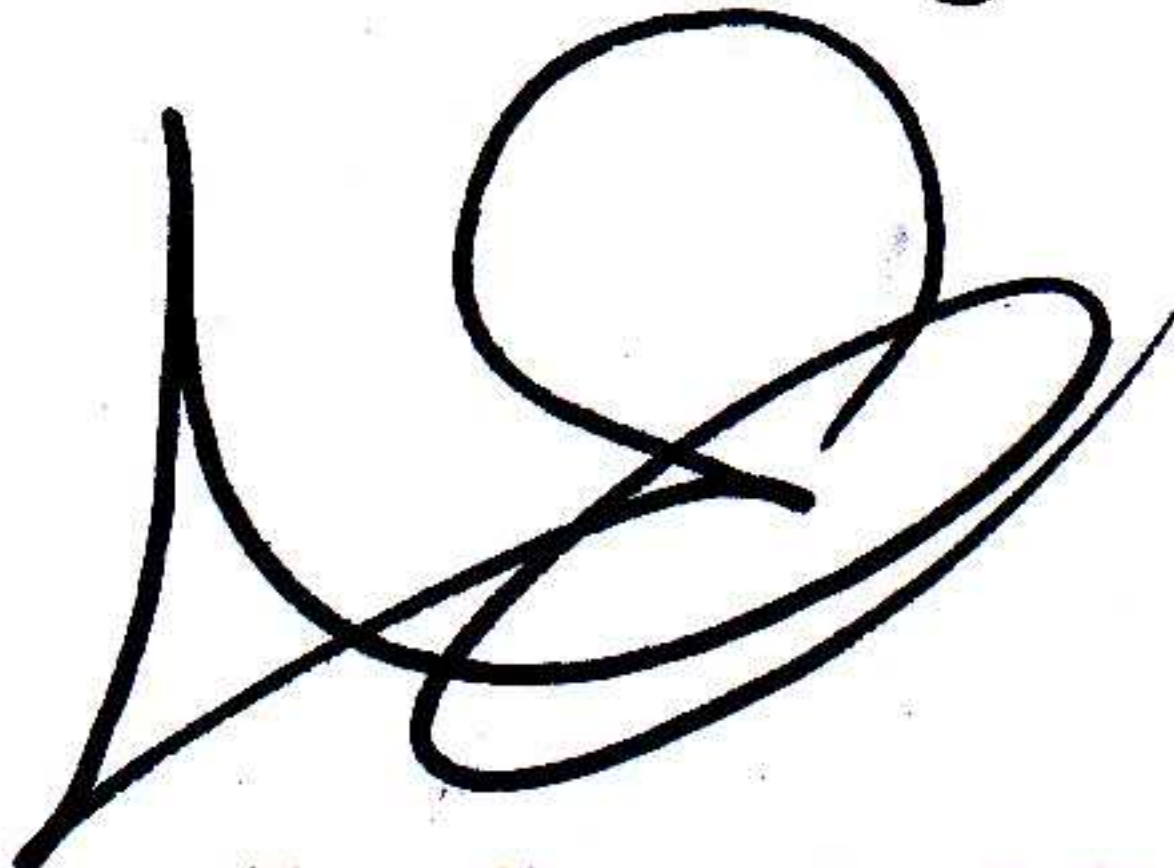
DANI RHAMADAN

97141/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi Dani Rhamadan untuk persyaratan wisuda periode 101 September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, September 2014

Pembimbing I



Drs. Etmihardi M. Hum

NIP. 196703041993031003

Pembimbing II



Drs. Gusraredi

NIP. 196112041986091001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

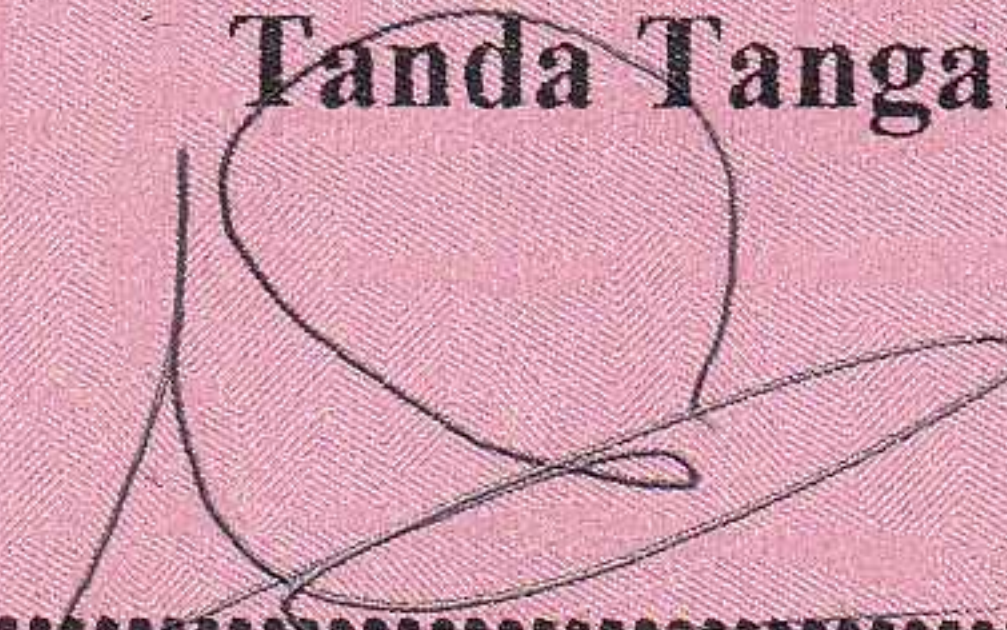
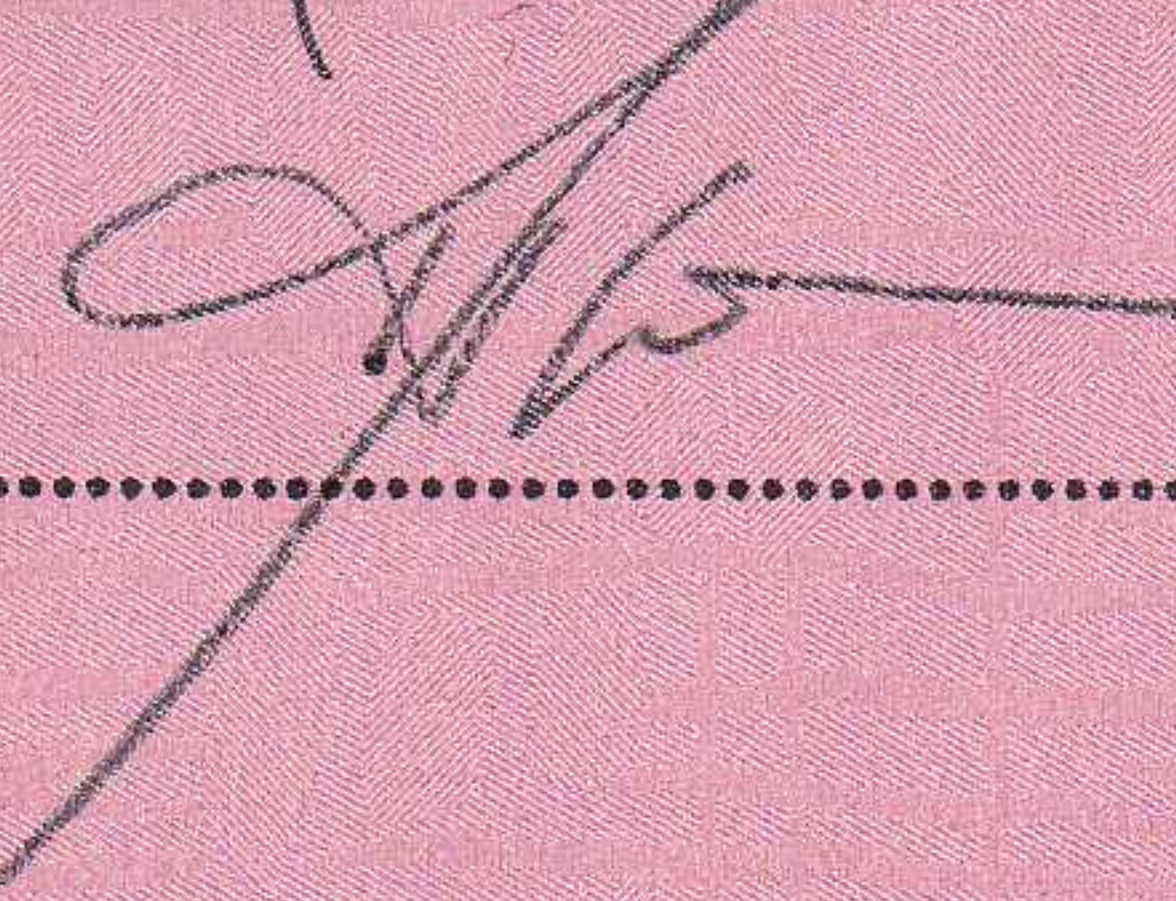
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 24 Juli 2014

**Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dalam Perspektif
Masyarakat Lintau (1958-1961)**

Nama : Dani Rhamadan
NIM : 97141
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Agustus 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Etmi Hardi, M.Hum	
Sekretaris	: Drs. Gusraredi	
Anggota	: Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	
	: Drs. Zul 'Asri, M.Hum	
	: Hendra Naldi, S.S, M.Hum	

ABSTRAK

Dani Rhamadan (2009/97141). Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dalam Perspektif Masyarakat Lintau (1958-1961). Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negri Padang.

Skripsi ini mengkaji pemahaman masyarakat Lintau Buo mengenai PRRI, serta bagaimana peran masyarakat dan daerah Lintau Buo dalam PRRI. Latar belakang dalam kajian skripsi ini adalah karena meningkatnya ketegangan politik antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat pasca diambil alihnya jabatan Gubernur Sumatra Tengah oleh Ahmad Husein, kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pengunduran diri Moh. Hatta sebagai wakil Presiden.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menjelaskan kisah nyata dan fakta mengenai peristiwa PRRI di Lintau Buo dan unsur-unsur yang mempengaruhi masyarakat Lintau untuk bergabung bersama PRRI. Pada akhirnya, bisa menjadi referensi dalam penulisan mengenai keadaan Lintau Buo pada masa PRRI dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Penulisan ini ditulis berdasarkan kaidah-kaidah yang lazim didalam ilmu sejarah, yakni dimulai dari pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan analisis. Sampai pada tahap penyusunan karya (historiografi). Sumber penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dari studi lapangan (sejarah lisan).

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, seluruh masyarakat Lintau Buo mendukung apa yang diperjuangkan oleh PRRI. *Kedua*, masyarakat Lintau mendukung PRRI karena berbagai alasan. Alasan yang mendasar kenapa masyarakat Lintau Buo mendukung PRRI adalah karena menurut mereka kedekatan pemerintah pusat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menurut mereka PKI itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ada yang bergabung setelah mendengar ceramah ustad dimesjid yang mengatakan kalau PRRI itu benar, karena banyak orang mendukung PRRI juga menjadi alasan sebagian masyarakat Lintau bergabung dengan PRRI, bagi mereka tidak mungkin masyarakat banyak akan mengikuti suatu hal yang salah dan tidak akan mungkin ustad akan mengajarkan suatu hal yang salah kepada masyarakat. *Ketiga*, dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar. Banyak pemuda Lintau yang putus sekolah, tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat, saat pergolakan usai APRI meninggalkan Lintau serta anak gadis Lintau yang telah dijanjikan untuk dinikahi, mereka terkenal dengan istilah “*ganja batu*”.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Dalam Perspektif Masyarakat Lintau (1958-1961)**”. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Padang (UNP).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan rintangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Untuk itu sudah sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Antara lain kepada.

1. Bapak Drs. Etmihardi M.Hum selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. Gusraredi selaku pembimbing dua yang telah membantu, motivasi dan membimbing penuh kesabaran dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Hendra Naldi SS, M.Hum, Drs. Zul ‘Asri M.Hum, Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku penguji.
3. Kepada orang tua, saudara, dan adik saya yang telah banyak memberikan motivasi dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu staf dosen jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Padang.
5. Semua Mahasiswa Jurusan Sejarah baik dari jaman katumba sampai jaman modern sekarang ini.
6. Kawan-kawan dari Cikini Stones Complex (CSC) yang bersedia memanjatkan doa dan tenaganya dalam pengumpulan data.

7. Narasumber penulis di Lintau yaitu Bapak Dt. Bagindo Anso, Bapak Syamsuar Ibrahim, Dt. Rajo Basa (RB) dan lain-lain yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penelitian yang lebih lanjut bagi mahasiswa sejarah khususnya dan masyarakat umum.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

8 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PRAKATA

ABSTRAK

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	18

BAB II KECAMATAN LINTAU BUO SEBELUM PERISRIWA PRRI

A. Geografis Lintau Buo	20
1. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Lintau Buo	22
2. Pemerintahan	25
B. Lintau Buo Tahun 1950-an	
1. Kemunduran Bidang Ekonomi	27
2. Kemunduran Bidang Sosial	30
3. Pendidikan	32

BAB III LINTAU BUO MASA PRRI DAN INGATAN MASYARAKAT TERHADAP PERISTIWA PRRI

A. Aktivitas PRRI di Lintau Buo	
1. Menyambut Para Pengungsi	35
2. Pemerintahan	38

3. Militer	41
B. Lintau Buo Masa Pergolakan (1958-1961)	
1. Lintau Buo Dibawah Kendali PRRI	45
2. Diambil Alih Pasukan APRI	48
3. APRI di Lintau Buo	52
C. PRRI Dalam Perspektif Masyarakat Lintau Buo	
1. Nilai-nilai diemban PRRI	57
2. PRRI dimata Pribuni Lintau Buo	63
D. Nasib Lintau Buo Pasca PRRI	
1. Wilayah	77
2. Pelaku	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tahun 1950-an Indonesia mengalami problematika internal dalam negeri yang cukup rumit. Perubahan sistem negara dalam jangka waktu singkat selama transisi PDRI-RIS-NKRI (1949-1950) mengakibatkan posisi pemerintah melemah akibat percaturan politik tidak sehat. Terlebih di saat keputusan nasional untuk menetapkan UUDS 1950 dan memberlakukan sistem Parlementer memunculkan ketidakpuasan rakyat dan ketidakstabilan negara. Pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan yang terus muncul dan akhirnya hubungan terjadi kekacauan sosial, ekonomi, politik, militer, dan pemerintahan.¹

Kekacauan terjadi akibat kebijakan satu pintu sesuai dengan aturan parlementer. Politik cukup besar memainkan peran dalam setiap keputusan yang diambil oleh parlemen. Sedangkan Nasib daerah dan nasional bergantung pada parlemen bukan dari partai politik. Hak masyarakat mengajukan aspirasi kian terkikis dan terbatas karena persoalan politik internal di dalam parlemen. Kondisi ini membuka peluang terciptanya kekacauan politik akibat saling serang kepentingan antar tokoh maupun partai politik yang berimbas langsung kepada kehidupan masyarakat banyak secara nasional. Kemelut politik atas kepentingan masing-masing membawa persoalan karena kebijakan yang diambil tidak mewakili aspirasi. Akibatnya

¹ Syamdani, PRRI ; *Pemberontak Atau Bukan ?*, (Yogyakarta, Medpress, 2009) hal 39

kekecewaan dihati rakyat mulai subur dihati rakyat, khususnya rakyat didaerah luar pulau Jawa dan berinisiatif melakukan gerakan pembangkangan terhadap pemerintah pusat.²

Salah satu aksi pembangkangan daerah yang menyita perhatian nasional tahun 1950-an adalah PRRI di Sumatera Tengah. Jauh sebelum itu, sejak Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, telah muncul aksi yang bersifat menentang pemerintah seperti pemberontakan Andi Aziz, DI/TII Kartosuwiryo, Teuku Daud Breueh, dan Kahar Muzakkar. Semua rentetan aksi daerah ini cukup memberi gambaran bahwa sejak revolusi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah bergelimang dengan berbagai corak kemelut politik yang membahayakan eksistensi dan keutuhan RI.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) lahir dari atas ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Puncaknya, daerah membacakan ultimatum Dewan Perjuangan oleh Kolonel Simbolon mengatasnamakan ketua Dewan Perjuangan, Kolonel Ahmad Hussein di Kota Padang tanggal 10 Februari 1958. Dalam isinya daerah menuntut pemerintah pusat bersikap tegas dan jelas atas aspirasi daerah dalam tempo waktu 5x24 jam. Ultimatum ini malah direspon negatif oleh pemerintah pusat dan mengeluarkan surat pemberhentian sejumlah perwira militer dari tubuh TNI-AD yang mendukung ultimatum

² Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi ; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal 253-254

seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Ahmad Hussein, Dahlan Djambek, Maludin Simbolon, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka.³

Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi pusat, tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan mengumumkan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibawah komando Ahmad Hussein. Gerakan PRRI mendapatkan sambutan positif dari beberapa tokoh nasional dan secara terbuka menyatakan diri bergabung bersama PRRI seperti Syafruddin Prawiranegara, M. Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Soemitro Djojohadikusumo. Dalam pembacaan proklamasi PRRI ini, Ahmad Hussein langsung membacakan struktur pemerintahan PRRI dan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.⁴

Dimata pemerintah pusat, lahirnya PRRI adalah sebuah keegoisan tokoh-tokoh di daerah Sumatera Tengah. Langkah berani daerah ini direspon pusat dengan cara mengirimkan militer Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk menghadapi PRRI yang juga memiliki kekuatan militer sendiri yang direkrut dari bekas tentara Divisi Banteng, simpatisan, masyarakat sipil, mahasiswa dan pelajar lokal.

Sebelum APRI mulai melakukan penyerangan tanggal 17 April 1958 melalui operasi 17 Agustus di bawah komando Jenderal Ahmad Yani diseluruh wilayah Sumatera Barat, pimpinan PRRI, Ahmad Hussein telah menyadari bahwa perkotaan tidak aman bagi para pendukung sipil PRRI berdiam diri dan berinisiatif untuk mengungsikan mereka ke Lintau Buo.

³ Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang ; Biografi Kolonel Ahmad Hussein* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001) hal 271

⁴ *Ibid*, 274

Mengungsikan penduduk sipil ini juga diikuti oleh militer PRRI akibat kekalahan yang terus menerus dalam berhadapan dengan APRI. Di sini para tokoh militer PRRI mendirikan pusat pelatihan militer bagi calon perwira PRRI yang dipersiapkan untuk terjun ke medan perang.⁵

Alasan pemilihan Lintau Buo didukung oleh faktor geografis yang sulit dijangkau. Kondisi perbukitan dan hutan serta kaya akan lahan pertanian menjadi Lintau Buo sebagai lokasi yang ideal bagi PRRI untuk berdiam diri dan bertahan hidup. Faktor jarak antara Lintau Buo dengan Riau juga sangat menguntungkan daerah ini.⁶

Selama era PRRI, mayoritas pribumi Lintau Buo dan wilayah sekitarnya berpihak kepada PRRI. Berbagai bantuan moril maupun materil diberikan sampai PRRI menyerah kepada pemerintah pusat setelah menerima amnesti dan abolisi Presiden Soekarno. Bukti dari keberpihakan pribumi Lintau Buo dapat dilihat dengan banyaknya pribumi yang bergabung dalam pelatihan militer bagi para perwira PRRI di Kawai dan Tabek Panjang.⁷

Keputusan mendukung PRRI, pastinya memiliki alasan yang kuat dan proses yang panjang, mengingat resiko yang harus diemban jika membantu PRRI yang dianggap oleh pemerintah pusat sebagai organisasi pemberontak. Bahkan, disaat Lintau Buo sudah diduduki oleh APRI, sebagian pribumi pendukung PRRI rela meninggalkan kampung halaman untuk berpartisipasi melanjutkan perjuangan PRRI di dalam hutan-hutan. Jikapun ada mereka yang

⁵ *Ibid*, 342

⁶ Pemda Tk II Tanah Datar, Sejarah Tanah Datar (Batusangkar, 1995) hal 339-345

⁷ Mestika Zed dan Hasril Chaniago. Biografi Ahmad Hussein. Hal 325-326

tetap tinggal di Lintau Buo, bantuan tetap diberikan secara diam-diam kepada pejuang PRRI.

Untuk mengetahui alasan pribumi Lintau Buo untuk mendukung PRRI, alangkah baiknya penulis mendalami proses dan pemikiran pribumi sampai pada keputusan untuk mendukung PRRI. Pengambilan keputusan ini memiliki alasan yang kuat mengingat akan berdampaknya kepada pelaku, khususnya menjalani kehidupan nantinya secara ekonomi, sosial dan karir pasca pergolakan PRRI. Sampai saat ini, baik didalam buku-buku, jurnal maupun tulisan bebas yang ditulis oleh akademisi dan sejarawan belum ada yang menjelaskan secara pasti proses dan pemahanaman kenapa masyarakat Lintau Buo berpihak kepada PRRI. kebanyakan tulisan yang telah ada hanya membahas sekitaran politik, militer, ekonomi dan sosial masyarakat Sumatera Tengah dalam menelaah PRRI. Ditambah lagi, berbagai tulisan hanya memperlihatkan cara pandang tokoh masyarakat, tokoh politik, dan tokoh militer PRRI.

Berdasarkan kasus studi diatas, muncul ketertarikan penulis untuk mengkaji pemikiran masyarakat Lintau didaerah Lintau Buo dari segi visi dan misi mereka memilih berpihak kepada PRRI. Karena itu, penulis memberi judul dalam skripsi ini *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Dalam Perspektif Masyarakat Lintau (1958-1961)*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang PRRI di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, dengan fokus pemahaman masyarakat Lintau mengenai PRRI, maka dari itu perlu dibuat batasan dan rumusan masalah untuk mempertegas arah penelitian ini. Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 1958-1961, Dipilihnya tahun ini 1958 dikarenakan disaat inilah PRRI mulai bergolak dan berakhir pada tahun 1961 setelah pihak PRRI menerima Amnesti dan Abolisi yang berikan oleh presiden Soekarno.

Masyarakat Lintau secara langsung terkena imbas dari perang, sedangkan masyarakat Lintau memiliki pengetahuan yang kurang valid dalam memahami pertikaian antara PRRI dengan APRI ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dikatakan penegasan mengenai batasan permasalahan dalam penelitian. Sesuai dengan fokus kajian di atas, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana masyarakat Lintau mengingat dan memahami nilai-nilai PRRI, baik secara kolektif maupun individual ?
2. Apakah keterlibatan masyarakat Lintau dalam PRRI mempengaruhi kehidupan mereka sampai saat ini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana masyarakat Lintau mengingat dan memahami nilai-nilai PRRI, baik secara kolektif maupun individual, serta apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Lintau yang terlibat PRRI sampai saat ini.

Manfaat :

Adapun manfaat dari tulisan ini memberikan wawasan tentang kisah nyata dan fakta perihal Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dalam perspektif masyarakat Lintau. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan akademik, sebagai tambahan literatur dalam dunia ilmu sejarah serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Penulisan tentang PRRI secara umum telah banyak dilakukan oleh para sejarawan atau penulis lain. Mengingat begitu banyaknya kajian relevan yang berbicara tentang PRRI, maka untuk kepentingan penulisan hanya beberapa saja yang dapat diuraikan.

Tulisan yang menjadi acuan penulis yakni skripsi yang ditulis oleh Deka Maita Sandi tahun 2010 yang mengkaji peranan Nagari Manggopoh dalam pergolakan PRRI. Peristiwa PRRI membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat Manggopoh baik dari aspek sosial, politik dan ekonomi. Penumpasan gerakan PRRI menjadi trauma mendalam bagi masyarakat.⁸

Selanjutnya Syamdani dalam skripsinya, *PRRI; Pemberontakan atau Pergolakan* (2000) menyorot tentang penulisan sejarah PRRI yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat dengan penafsiran tunggal terhadap suatu peristiwa, yaitu suatu peristiwa semacam PRRI adalah pemberontakan, tanpa dipandang perlu untuk menggalinya lebih dalam. Penafsiran tunggal tersebut telah memporak-porandakan penulisan sejarah di Indonesia terutama penulisan sejarah setelah revolusi fisik.⁹

⁸ Deka Maita Sandi, 2010. Nagari Manggopoh pada masa pergolakan daeah . *Skripsi*. Padang: FIS Universitas Negeri Padang

⁹ Syamdani. 2000. PRRI, Pemberontakan atau pergolakan: Sebuah Tinjauan Historiografi. *Skripsi*. Padang: FIS Universitas Negeri Padang.

Tulisan lain adalah skripsi yang ditulis oleh Weftriyawati tahun 2004 yang mengkaji konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Kayutanam pada masa PRRI. Peristiwa PRRI membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat Kayutanam baik dari aspek sosial, politik dan ekonomi. Penumpasan gerakan PRRI menjadi trauma mendalam bagi masyarakat, begitupun setelah pasukan PRRI menyerah, "bekas" PRRI masih menderita secara mental oleh tindakan OPR yang membonceng APRI sehingga memicu dendam.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Hera Hastuti menjelaskan bagaimana peranan Nagari Paninggahan pada masa pergolakan PRRI dimana letak wilayahnya yang strategis tekstur nagari yang dipagari oleh hutan-hutan yang lebat menjadikan Nagari Paninggahan sangat penting dalam masa pergolakan.¹¹

Mestika Zed dalam *Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1998)*, menyatakan era PRRI sampai pemberontakan G30S (Gerakan Tiga Puluh September), bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Minangkabau merupakan periode sejarah yang penuh benturan, baik yang bersifat fisik maupun mental. Peristiwa PRRI yang digerakkan oleh kekuatan anti-PKI bukan saja telah menyulut perang saudara tetapi juga memberikan peluang yang besar bagi PKI untuk meluaskan pengaruhnya di dalam

¹⁰ Weftriyawati, 2004. Konflik Sosial di Kayutanam Masa PRRI. *Skripsi*. Padang : FIS-Universitas Negeri Padang

¹¹ Hera Hastuti, 2010. Nagari Paninggahan pada masa PRRI (1958 – 1961). *Skripsi*. Padang : FIS Universitas Negeri Padang.

masyarakat, akibatnya timbul tekanan politis yang menyebabkan timbulnya krisis dalam masyarakat Minangkabau yang di kenal sebagai trauma PRRI.¹²

R.Z. Leirissa, dalam bukunya *PRRI-Permesta; Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis (1997)*, mendeskripsikan bagaimana persepsi para eksponen PRRI-Permesta mengenai tanah air pada tahun 1950-an. Pokok penting yang ia tulis adalah bagaimana upaya para eksponen PRRI-Permesta dalam menyusun strategi pembangunan berskala nasional, tanpa keterlibatan PKI dalam kegiatan politik nasional.¹³

Dalam karya yang lain, *Biografi Ahmad Husein:Perlawanan seorang Pejuang (2001)*, Mestika Zed menuliskan bahwa ketegangan hubungan antara pusat dan daerah mencapai klimaksnya ketika kebuntuan nasional tidak menemukan jalan akhirnya menjerumuskan Republik kedalam krisis paling parah setelah merdeka, ialah perang dengan juga melibatkan CIA, Amerika Serikat. Husein pun mengeluarkan ultimatum kepada pusat, dan lima hari kemudian disusul dengan terbentuknya pemerintahan tandingan, PRRI yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.¹⁴

¹² Mestika Zed, Edy Utama dan Hasril Chaniago. 1998. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹³ R.Z. Leirissa. 1997. PRRI-PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. Jakarata: Grafiti.

¹⁴ Mestika Zed & Hasril Chaniago. 2001. Ahmad Husein; Perlawanan Seorang Pejuang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Semua karya dari para sejarawan dan penulis tersebut, sangat membantu dan menunjang dalam penelitian dan penulisan ini, walaupun kajian khususnya berbeda. Penulis lebih menitikberatkan pada pandangan masyarakat Lintau tentang peristiwa PRRI ini.

2. Tinjauan Konseptual

a. Peristiwa Sejarah

Sumatera Barat, memiliki dinamika yang menarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua suku di Indonesia mengakui banyak tokoh-tokoh besar yang lahir atau memiliki hubungan dengan Sumatra Barat, dikemudian hari tokoh-tokoh ini ada yang di pandang sebagai “ pahlawan” maupun “penjahat” terhadap perjalanan bangsa ini.

Dr. Muhammad Hatta dan Mr. Muhammad Yamin salah satu tokoh yang di pandang memiliki peran yang sangat besar dalam mendirikan bangsa ini, sedangkan DN. Aidit, merupakan salah satu tokoh Sumatra Barat yang dikenal sebagai pemimpin “Pemberontak” yang telah memberi nada kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia dan tak diakui sebagai orang Minang lagi.¹⁵

Begitu juga pada peristiwa PRRI yang pecah di tengah masyarakat Sumatera Tengah telah membuat masyarakat menjadi dua golongan. Ada yang mendukung dan ada yang menolak PRRI.

¹⁵ Efrianto A,SS, memahami nilai dalam peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia sebagai media informasi dan pembelajaran.

Dalam tulisan nya, Prof. Mestika Zed menjelaskan pemberontak atau tidaknya PRRI ini tergantung pada pengertian dan titik pandang yang digunakan, orang yang berpihak kepada PRRI berpikir telah terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, dan pemerintah pusat sudah keluar dari ideologi Pancasila karna terlalu dekat dengan Partai Komunis. Sedangkan yang menolak gerakan PRRI ini berpikir kalau apa yang telah dilakukan PRRI ini adalah aksi pemberontakan, karena telah mendirikan suatu pemerintahan tandingan.

Memang Pemerintah sejak semula dan sampai kini (dalam buku-buku sejarah) menggunakan kata “*Pemberontakan*” terhadap PRRI dan karena itu dipandang inkonstitusional dan bahkan dituduh sebagai gerakan saporatis dan petualangan pribadi. Namun pandangan semacam itu, menurut Yamin, kecuali “*Dangkal Tetapi Juga Menyesatkan*”.¹⁶

Dalam hal ini, pertentangan dua pemikiran ini tidak lain karena keegoisan dalam mengedepankan kepentingan antara pemerintah daerah dan pusat. Di daerah untuk membuat keinginan mereka terakbul langsung mendirikan PRRI. Sedangkan di pusat untuk mengedepankan kepentingan mereka, langsung mencanangkan Nasakom yang didekritkan pada tanggal 1 Juli 1959.

¹⁶ Mestika Zed, PRRI Dalam Pergolakan Daerah tahun 1950-an.

Pertentangan kedua belah pihak ini sebenarnya sama-sama bertujuan untuk memberikan masukan bagaimana cara mengelola negara Indonesia ini dengan baik. Hanya saja di dua pihak ini saling bertentangan dalam mengambil langkah. Akibatnya, Sumatera Tengah bergolak dan terjadi perang saudara.

Dalam situasi perang ini, opini masyarakat berkembang pesat. Ada yang awalnya mendukung, kemudian menolak PRRI. Ada yang awalnya menolak kemudian mendukung PRRI. Bahkan ada yang memihak salah satu kemudian bersikap netral dan sebaliknya. Saat PRRI berlangsung, setiap masyarakat berhak memilih siapa yang didukung melalui analisis masing-masing. Terlebih masyarakat Sumbar memang terkenal sebagai orang yang memiliki intelektual yang tinggi.

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam menentang dan mendukung PRRI di Sumatera Barat yang begitu banyak memperlihatkan ada kajian analisis yang begitu mendalam dari seluruh lapisan Masyarakat tak terkecuali golongan masyarakat Lintau.

b. Pemahaman Sejarah

Drs. Bambang Budi Utomo seorang Arkeolog senior di pusat Arkeologi Nasional dalam sebuah diskusi menyampaikan “Bahwa belajar sejarah bukan lah untuk berbangga-bangga tentang kejayaan

masa lalu, namun untuk mempelajari bagaimana mereka bisa hidup dan menciptakan peradaban yang bisa kita nikmati dan kita lihat hingga hari ini.¹⁷

Sebagai suatu bangsa, semestinya peristiwa PRRI dapat memberikan kesadaran bahwa persaingan dan perbedaan partai yang tidak ada hentinya bisa menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat luas tak terkecuali masyarakat Lintau.

Generasi muda yang hidup saat ini terlanjur meyakini bahwa PRRI merupakan sebuah “Pemberontakan” untuk itu perlu adanya sebuah upaya bersama dan sistematis agar peristiwa PRRI bukan lagi dipandang sebagai sebuah pemberontakan namun koreksi terhadap jalannya pemerintahan.¹⁸

c. *Civil Society, Masyarakat Madani, atau Masyarakat Sipil*

Gagasan tentang *civil society* telah mendapat tempat di Indonesia. Kendati baru digunakan sejak akhir dekade 1990-an, istilah *civil society* dengan terjemahannya beragam, seperti “masyarakat sipil”, “masyarakat madani”, “masyarakat warga”, atau “masyarakat kewargaan” sering menjadi wacana utama dalam diskusi, penelitian dan penerbitan.

¹⁷ Efrianto A, SS memahami nilai dalam peristiwa PRRI sebagai media informasi dan pembelajaran.

¹⁸ *Ibid.*,

Konsep *civil society* berasal dari sejarah peradaban Barat. ditempat asalnya *civil society* kembali hadir ketika gerakan solidaritas di Polandia pimpinan Lech Walesa melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jendral Jeruzelski. Dalam perlawanan tersebut, solidaritas menggunakan *civil society* sebagai dasar sekaligus arah perjuangan dengan tekanan utama perlawanan terhadap otoritarisme negara. Pola solidaritas ini menjalar kebeberapa negara Eropa Timur lainnya. Inti dari konsep ini adalah perlawanan terhadap segala jenis otoritarisme dan totalitarisme.

Secara analitis konsep *civil society* berakar pada suatu bangunan pemikiran yang nantinya menjadi model mengenai manusia dan masyarakat. Bangunan tersebut dapat ditelusuri kembali pada benih-benih awal yang dibangun oleh para Filosof Stoa (filsafat alam). Mereka merupakan jajaran pemikir yang merumuskan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesedarajatan. Filsafat alam ini kemudian diubah oleh apara pemikir Patristik yang mengganti kekuatan alam dengan kekuasaan Illahil. Sumber utama kemampuan manusia bukanlah alam, melainkan Tuhan. Meskipun demikian, inti bangunan tetap sama, yaitu keyakinan bahwa manusia memiliki “bakat” dasar bagi kebaikan, dan berkat “bakat” tersebut, manusia berhak untuk melakukan sesuatu secara bebas dan berdiri sejajar sesamanya.

Civil society bukanlah entitas sosial yang terdiri dari kumpulan manusia. Ia juga bukan manifestasi dari sistem komunal yang dikenal luas oleh masyarakat tradisional. *Civil society* merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut intrinsiknya. Oleh karenanya, konsep *civil society* juga terdapat pada konsep manusia sebagai individu, jika individu merupakan ruang pribadi, *civil society* merupakan ruang publik. Oleh karena itu didalam *civil society* harus terdapat kebebasan, kesederjatan dan nilai-nilai yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan atau keseimbangan. *Civil society* juga bukan hanya ruang publik yang pada umumnya ditampilkan dalam bentuk kesatuan sosial lain seperti partai, agama, atau komunitas.¹⁹

d. Sejarah Sebagai Ingatan Individual Dan Kolektif

Memori sebagai bentuk ingatan manusia ada yang bersifat pribadi (individu) dan ada yang bersifat kolektif. Memori pribadi berupa ingatan individu tentang kejadian sehari hari, sedangkan memori kolektif adalah bentuk ingatan bersama. Secara realitas sebenarnya sukar membedakan memori pribadi dengan memori kolektif sebab memori kolektif pada dasarnya adalah akumulasi dari ingatan individu. Dalam hal ini tentu saja sejarah lebih merupakan memori kolektif manusia.

¹⁹ Ali Munhanif, Hendro Prasetyo, dkk. *Islam dan civil society, pandangan muslim Indonesia*.

Semua memori individu di lingkungan yang berbeda-beda pada hakekatnya ialah memori kelompok. Memori individu hanya muncul ketika memori itu memang unik di antara orang-orang dalam kelompoknya. Lalu bagaimana memori individu menjelma menjadi memori kolektif? Secara teoritis ada dua cara, yaitu: pertama jika seseorang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah tertentu, dan kedua jika ia mewariskan pengalamannya kepada orang lain atau generasinya.

Ada kecendrungan individu berkompromi tentang masa lalu yang perlu diingat, atau untuk dilupakan. Dalam hal ini ingatan ingatan individu berakumulasi membentuk “versi sejarah” yang disetujui. Contoh nyata dapat dilihat di era Orde Baru, dimana rezim Soeharto bersepakat untuk membuat sejarah sesuai dengan versi kelompok yang dominan dan berkuasa ketika itu.²⁰

²⁰ Drs.Etmi Hardi M.Hum, *Memori Dan Sejarah*

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan-tahapannya berupa: Tahap *pertama* Heuristik, dimana tahap pengumpulan data melalui kegiatan studi kepustakaan guna memperoleh informasi dalam mengawali penyusunan proposal penelitian. Diawali dengan mengumpulkan buku-buku yang terdapat dalam labor Jurusan Sejarah UNP, Perpustakaan Pusat UNP, hingga pencarian buku-buku dan koran penunjang penelitian di tempat lain.

Pelaksanaan penelitian selanjutnya penulis melakukan penelusuran sumber tertulis, dokumen hingga buku yang relevan mengenai PRRI yang dapat dilakukan di Labor Jurusan Sejarah UNP, Perpustakaan Pusat UNP, Dewan Harian Daerah 45 Padang, Perpustakaan FIB Unand, Perpustakaan Nasional dan tokoh tokoh yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa PRRI.

Tahap *kedua* adalah kritik sumber yaitu melakukan pengujian data yang ditemukan dengan melakukan kritik sumber yaitu dengan melakukan pengujian data yang ditemukan dengan kritik internal dan kritik eksternal. Kritik eksternal yaitu melakukan pengujian otentitas atau keaslian data, sementara kritik internal yaitu dilakukan untuk menguji keabsahan informan. Hal ini tentunya setelah penulis menemukan arsip tersebut pada saat penelitian.